



## Post-Election Economic and Business Challenges: Leadership Transition from President Susilo Bambang Yudhoyono to President Joko Widodo in Indonesia

Evander Dio Pratama<sup>1\*</sup>, Gheyza Fiorent Putri Ngatih<sup>2</sup>, Rahma Diva Anjani<sup>3</sup>.  
SMA Negeri 16 Surabaya.

**Corresponding Author:** Evander Dio Pratama [evanderdio11@gmail.com](mailto:evanderdio11@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Challenges, Leadership, Investors, Policy, Inflation

*Received :* 28, April

*Revised :* 20, May

*Accepted:* 25, June

©2024 Pratama, Ngatih, Anjani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Post-election economic and business challenges are the main focus in facing the leadership transition from President Susilo Bambang Yudhoyono to President Joko Widodo in Indonesia. This research investigates the economic and business challenges following political elections on economic stability and business conditions in Indonesia. A thorough analysis was conducted to evaluate the economic policies implemented by both governments and their impact on economic growth, investment and the overall business climate. By considering the challenges and opportunities faced, this research also identifies strategies that can be taken to strengthen the Indonesian economy and business in the context of a dynamic leadership transition. The research method used in this study is a literature review. This approach involves comprehensive collection and analysis of relevant literature, articles, research reports and publications related to the theme discussed.

---

## Tantangan Ekonomi dan Bisnis PascaPemilu: Transisi Kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo di Indonesia

Evander Dio Pratama<sup>1</sup>, Gheyza Fiorent Putri Ngatihah<sup>2</sup>, Rahma Diva Anjani<sup>3</sup>.  
SMA Negeri 16 Surabaya.

**Corresponding Author:** Evander Dio Pratama [evanderdio11@gmail.com](mailto:evanderdio11@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Tantangan, Kepemimpinan, Investor, Kebijakan, Inflasi

*Received :* 28, April

*Revised :* 20, Mei

*Accepted:* 25, Juni

©2024 Pratama, Ngatihah, Anjani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Tantangan ekonomi dan bisnis pascapemilu menjadi fokus utama dalam menghadapi transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo di Indonesia. Penelitian ini menyelidiki tantangan ekonomi dan bisnis pascapemilu politik terhadap stabilitas ekonomi dan kondisi bisnis di Indonesia. Analisis menyeluruh dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh kedua pemerintahan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan iklim bisnis secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat ekonomi dan bisnis Indonesia dalam konteks transisi kepemimpinan yang dinamis. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis secara komprehensif terhadap literatur, artikel, laporan riset, dan publikasi terkait yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

---

## PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan beragam sektor yang berkembang. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi, dimana masyarakat yang memiliki pendapatan dari hasil kerjanya akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Zatira *et al.*, 2021). Namun, pemerintah masih belum mampu untuk menciptakan masyarakat yang lebih membangun. hal tersebut disebabkan oleh minimnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir masyarakat dan para pelaku usaha, sehingga masyarakat cenderung terus menerus menerima produk barang maupun jasa dari luar. (Jawa *et al.*, 2018). Pada setiap 5 tahun sekali, terjadi peralihan pemimpin yang menyebabkan susunan kabinet, aturan, juga upaya yang diberlakukan berubah. Apabila dalam peralihan tersebut tidak dioptimalkan dengan bijak, maka akan mengguncang perekonomian negara dan mendorong terjadinya inflasi maupun deflasi yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Terdapat kesamaan antara masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, dimana kedua pemimpin tersebut menjabat sebagai kepala negara selama 2 periode. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 5,74% dan konsumsi rumah tangga menyentuh 4,75%. Sedangkan di masa pemerintahan Joko Widodo rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,09% sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 3,75%. (CNBC, 2023)

Stabilitas kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa aspek dalam masyarakat secara makro. Contohnya adalah pertumbuhan ekonomi, dan dinamika inflasi. tentunya terdapat berbagai perubahan dan perbedaan pada setiap peralihan masa jabatan presiden di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas dari perbedaan instrumen atau variabel yang mempengaruhi pada aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, variabel atau instrumen yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan moneter berupa suku bunga. Sedangkan pada masa jabatan Presiden Joko Widodo, variabel atau instrumen yang dapat dilihat dengan jelas mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara pertumbuhan ekonomi adalah nilai tukar uang. Walau demikian, pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo terdapat kesamaan yaitu nilai tukar sebagai variabel atau instrumen paling kuat yang memengaruhi dinamika inflasi.

Kesamaan dan perbedaan variabel atau instrumen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dinamika inflasi selama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Meskipun fokus kebijakan cenderung berbeda, seperti suku bunga pada era Bambang Yudhoyono dan nilai tukar uang pada era Joko Widodo, keduanya menunjukkan pentingnya stabilitas ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami peran variabel atau instrumen tersebut, pemerintah mampu merancang kebijakan yang lebih

efektif untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengendalikan tingkat inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. (Kumparan, 2019). Peristiwa yang mendorong pembentukan kebijakan seringkali diiringi dengan berbagai hambatan yang berpengaruh dalam proses tersebut. Meskipun hambatan tersebut mampu menjadi pendorong kemajuan negara, tantangannya terletak pada bagaimana negara menjaga keberlangsungan kebijakan yang sudah dibangun meskipun terjadi peralihan pemimpin. masyarakat merupakan objek ekonomi, sehingga analisis ini dapat memudahkan penulis dan pembaca, dalam mengkaji dan memperhatikan pro dan kontra mengenai kerjasama antarinvestor asing dengan lebih transparan. Dalam menganalisis hal tersebut, digunakan teori Stakeholder Management: Pada konteks bisnis, teori ini menyatakan bahwa pengelolaan hubungan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, merupakan faktor penting dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dalam lingkungan politik yang berubah-ubah (Haisir, 2017). Hasil analisis ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan, mengenai kebijakan yang diberlakukan selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi tantangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Pengertian Peran Presiden dalam Perekonomian***

Secara umum, presiden adalah kepala pemerintahan dan pemimpin fundamental negara atau kepala negara rujukan. Istilah "presiden" lebih spesifik digunakan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif, terutama dalam kepemimpinan negara republik, baik dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu maupun tidak langsung. Presiden memegang peran sebagai pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republik, maka dari itu kinerja presiden dalam memimpin dan mengatasi permasalahan negara akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sebagaimana yang telah diketahui, ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara, karena menyangkut keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. (Juniarsih, *et al.*, 2020)

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature study*). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan. (Putri *et al.*, 2020).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Tantangan dalam Perekonomian di Indonesia***

Krisis keuangan global merupakan kondisi di mana terjadi gangguan atau ketidakstabilan yang signifikan di pasar keuangan secara global, yang berdampak pada ekonomi negara-negara di seluruh dunia (Citra *et al.*, 2012). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakmampuan membayar

hutang, gelembung aset yang pecah, atau kepanikan pasar yang meluas. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi krisis keuangan global yang cukup krusial pada tahun 2008. Gelembung properti di AS meledak, mengakibatkan penurunan nilai aset dan kebangkrutan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers. Hal ini memicu ketidakstabilan di pasar keuangan global, likuiditas yang terbatas, dan resesi ekonomi yang meluas di banyak negara. Di Indonesia, ekonomi juga terkena dampak dari krisis keuangan global tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi sebelumnya relatif kuat, namun negara ini tidak luput dari dampak krisis tersebut. Ekspor menurun, arus modal keluar, dan nilai tukar rupiah terdepresiasi. Hal ini menyebabkan menghambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Pada era pemerintahan Joko Widodo, krisis ekonomi dan keuangan pun terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya virus COVID-19 yang mewabah secara global atau mendunia, sehingga pemerintah di Indonesia menerapkan kebijakan *Social Distancing*, *Work From Home* (WFH) sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau mewajibkan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga jarak antarindividu dan kelompok selama beraktifitas, dan bekerja di tempat tinggal untuk mengurangi resiko dari penularan akibat kontak fisik. Namun kebijakan tersebut tetap tidak mampu mengurangi krisis ekonomi yang terjadi, melainkan memperbesar peluang terjadinya krisis ekonomi yang akut. Hal tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang menurun, serta kelangkaan barang yang disebabkan oleh minimnya aktivitas produksi sehingga perputaran keuangan di masyarakat berkurang, meningkatnya kesulitan mendapatkan pembiayaan, juga inflasi meningkat.

Dalam menjalankan negara tidak luput dari kepentingan kerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan, hal inilah yang dijadikan salah satu faktor pendorong adanya investor asing dalam negeri, demi meningkatkan pemasukan negara melalui pajak dan menjalin kerjasama antar dua negara. Namun dalam menarik investor tentunya diperlukan keuntungan yang menarik bagi para investor agar mereka tidak enggan berinvestasi di dalam negeri, keuntungan inilah yang mendorong kebijakan-kebijakan baru. Namun negara juga tetap mengedepankan keuntungan yang diperoleh, sehingga diperlukan kebijakan yang penuh perhitungan dengan Undang Undang yang melindungi negara sebagai tempat investor menanam modal. Namun keketatan ini justru menjadi salah satu akibat dari sedikitnya investor asing yang tertarik menanamkan modal di dalam negeri. Sebuah negara memerlukan pendekatan yang seimbang antara memberikan insentif kepada investor asing dan menjaga kepentingan serta keamanan negara. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur dan menyediakan fasilitas yang mendukung bagi para investor, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh investor. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing untuk

menanamkan modal di dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

### ***Tindakan yang Dilakukan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi***

#### ***Era Susilo Bambang Yudhoyono***

Upaya mengatasi krisis ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diberlakukan beberapa kebijakan demi mendorong likuiditas dan menaikkan nilai mata uang rupiah, antara lain:

a. Pemerintah Mengeluarkan Tia Perppu

Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Perppu 2/2008. Aturan ini dibuat untuk memperkuat fungsi lender of the last resort BI dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan agunan dalam Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Kemudian, Perppu 3/2008 dibuat untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, Perppu 4/2008 menetapkan mekanisme, tata cara dan koordinasi antar lembaga yang berwenang mencegah serta menangani krisis.

b. Menurunkan Giro Wajib Minimum

Pada Oktober 2008, BI menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% ke 7% dan kewajiban valuta asing dari 3% menjadi 1%, hal ini dilakukan untuk menstimulasi masyarakat dalam melakukan kredit.

- 1) Dampak dari penurunan GWM adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar (JUB). Hal ini diakibatkan dari adanya krisis ekonomi global pada tahun 2007 yang berdampak kepada negara-negara lain di akhir 2008. Krisis ekonomi global ini menyebabkan deflasi di negara Indonesia, sehingga pemerintah melakukan tindakan penurunan GWM demi menstabilkan perekonomian negeri.
- 2) Dampak dari penurunan valuta asing adalah untuk menstimulasi pergerakan rupiah agar semakin naik dan kunjung membaik. Hal ini dikarenakan valuta asing yang menjadi alat pembayaran internasional digeser dengan rupiah, sehingga penggunaan rupiah untuk bertransaksi akan mengalami peningkatan.

#### ***Era Joko Widodo***

Upaya Pemerintah di masa Joko Widodo dalam mengatasi krisis ekonomi 2013, yaitu dengan melakukan perlambatan ekonomi agar tidak terjadi overheating. Sebagai dampak dari adanya perlambatan ini, aktivitas bisnis pun menurun. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran, pemerintah memberikan insentif pada dunia usaha agar dapat bertahan tanpa harus melakukan PHK. Sementara pada tahun 2020, pemerintah mengatasi krisis ekonomi dengan cara menggerakkan ekonomi nasional yang sempat beku akibat pandemi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 172,1 triliun untuk bantuan masyarakat agar mereka memiliki daya beli. Selain itu, pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif kepada korporasi maupun UMKM. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian Surat Berharga Negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan sehingga mendorong aktivitas dunia usaha.

### ***Tindakan yang Dilakukan dalam Menarik Investor Asing***

#### *Era Susilo Bambang Yudhoyono*

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikategorikan cukup tinggi. Namun hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan harga komoditas global. Seorang peneliti Institute For Development Of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi *commodity boom* yang menyebabkan ekspor membaik, dimana keuntungan tersebut merambat ke sektor lain karena pendapatan juga naik, seperti konsumsi rumah tangga, dan sektor ekonomi lainnya. Namun dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia, pemerintah lebih fokus dalam peningkatan subsidi energi bagi masyarakat yang mencapai 19% dalam APBN. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dikategorikan gagal karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur kurang dari 8 persen dalam APBN. Akibatnya investor asing di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaruh minat untuk menjalin kerjasama karena kondisi pembangunan infrastruktur tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun.

#### *Era Joko Widodo*

Segala upaya telah dilakukan dalam rangka menarik minat investor asing, termasuk melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan dua Paket Kebijakan Hukum (PKH), yaitu PKH Jilid I dan PKH Jilid II, juga Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I sampai dengan PKE XVI, yang terdiri dari produk-produk hukum dengan jumlah yang masif (jurnal 004). Beberapa hal yang berubah seperti :

- a. Kebijakan Kemudahan Berusaha: Meluncurkan berbagai kebijakan untuk memudahkan berusaha di Indonesia, termasuk percepatan perizinan dan peningkatan efisiensi birokrasi.
- b. Penyederhanaan Peraturan: Melakukan penyederhanaan peraturan dan prosedur perizinan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
- c. Program Infrastruktur: Melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi Indonesia, sehingga

menarik minat investor asing, contohnya seperti pembangunan IKN dan pembangunan infrastruktur jalan di Papua sebagai bentuk mendukung masyarakat dalam bermobilisasi.

Dampak nyata kebijakan ekonomi yang diterapkan selama pemerintahan Jokowi antara lain:

1. Peningkatan daya saing Indonesia: Melalui program pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, Indonesia berhasil meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonominya. Contohnya adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, meningkatkan mobilitas barang dan orang serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
2. Pertumbuhan investasi: Kebijakan pemudahan berusaha dan penyederhanaan peraturan investasi telah meningkatkan minat investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan investasi asing langsung (FDI) yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir.
3. Peningkatan akses layanan publik: Dengan upaya penyederhanaan perizinan dan peningkatan efisiensi birokrasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik seperti perizinan usaha, izin mendirikan bangunan, dan lainnya.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mampu meningkatkan daya tarik Investor asing untuk bekerjasama dengan Indonesia. Namun, laju perekonomian di masa Joko Widodo mengalami penurunan dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono dikarenakan adanya krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pembahasan tersebut, diketahui bahwa dalam menjalankan sebuah negara diperlukan strategi yang baik untuk membawa negara tersebut menjadi negara yang lebih maju. Di Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih fokus pada peningkatan harga BBM demi meningkatkan PNB. Namun hal ini justru membuat konsumsi rumah tangga menurun dari 4% ke 3,2%. Hal ini terlihat tidak efisien karena ketidakstabilan harga BBM mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan sehingga harus dilakukan peningkatan Giro Wajib Minimum untuk menstimulasi masyarakat melakukan kredit. Sedangkan pada era pemerintahan Joko Widodo, sektor pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan untuk memperbaiki keseimbangan ekonomi masyarakat dan mendorong minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pendapatan PDB bisa terus meningkat dan akan berdampak pula pada PNB.

Kedua era pemerintahan tersebut, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun berdasarkan persentase pertumbuhan

ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi daripada masa Joko Widodo, dikarenakan di masa pemerintahan Joko Widodo terjadi pandemi COVID-19 yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari kebijakan yang ada, Joko Widodo lebih fokus pada pemerataan infrastruktur dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih berfokus pada subsidi untuk rakyat.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mampu memperoleh peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan subsidi energi. Sedangkan pada era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mampu memperoleh peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui upaya Presiden Joko Widodo dalam menyeimbangkan pengeluaran negara atau anggaran dalam membangun infrastruktur, serta memudahkan investor asing untuk berbisnis atau berinvestasi dengan melakukan amandemen terhadap berbagai undang-undang mengenai hak investor asing untuk berinvestasi dalam negara Indonesia. Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh kepala pemerintah sebelumnya, diharapkan calon Presiden yang akan diangkat sebagai kepala pemerintahan berikutnya untuk dapat lebih bijak dalam mengatur dan mengelola kebijakan secara lebih optimal, meneruskan upaya-upaya kepala pemerintah sebelumnya dalam memajukan negara, dan menanggulangi kelemahan serta kekurangan pada masa pemerintahan sebelumnya agar Indonesia mampu untuk menjadi negara yang lebih maju sehingga dapat tercapainya visi Indonesia emas di tahun 2045.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada Tantangan Ekonomi dan Bisnis pasca pemilu pada masa transisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo, diharapkan pula penelitian ini mampu menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). *Economics Working Paper 02-2017*.  
Besar, G., Ekonomi, F., & Pekalongan, U. (2013). Nomor 01. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 12). <http://www.menlh.go.id>  
Fahira, P. A., Farikhah, J. A., Nafila, A. L., Adjipersadani, G., Nugroho, P. M. P., & Mubah, A. S. (2022). Comparative analysis of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo's food estate policies as a national food securitization attempts. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(2), 195–206. <https://doi.org/10.20473/jsd.v17i2.2022.195-206>.  
Hanura, M. (2018). Assessing Indonesia-Russia Foreign Policy during Susilo Bambang Yudhoyono Administration. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 17).  
Hukum, F., & Tinggi Hukum Bandung, S. (n.d.). *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara Agung Sudjati Winata* (Vol. 2, Issue 2).

- Iksan Burhanuddin, C., & Nur Abdi, M. (2020). *AkMen ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)*. 17.
- Jona Mahadana, S. (2023). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN JOKOWI: PERKEMBANGAN, PRIORITAS, DAN TANTANGAN. In *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Issue 10).
- Junaedi, D., Rizal Arsyad, M., & Nasional Laa Roiba Bogor, I. (n.d.). *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal Tata Kelola Utang dan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Studi Komparasi Antar Rezim Pemerintahan*. <https://doi.org/10.XXXXX/assyirkah.v1i1.6>
- Juniarsih, S., Ripanti, E. F., & Pratama, E. E. (2020). Implementasi Naive Bayes Classifier pada Opinion Mining Berdasarkan Tweets Masyarakat Terkait Kinerja Presiden dalam Aspek Ekonomi. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin)*, 8(3), 239. <https://doi.org/10.26418/justin.v8i3.39118>
- Khoirudin, R., Ismaulida, A., & Khasanah, U. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Global and Multidisciplinary*, 1, 407-416. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>
- Kusumawati, A. J. (2011). A DISCOURSE ANALYSIS OF SBY'S INTERNATIONAL SPEECH TEXT: A STUDY ON CRITICAL LINGUISTICS BACKGROUND OF THE PROBLEM. In *Journal of English and Education* (Vol. 5, Issue 1).
- Sinaga, L. C. (2020). Assessing The Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014 [Menilai Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Kebijakan Perubahan Iklim: Pemerintahan Presiden Yudhoyono 2004-2014]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 163-182. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1752>
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237-266. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.
- Zubaidah, T., Heleyneliya Putri, F., & Pangastuti, N. (2021). KRISIS EKONOMI BANGSA INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19. In *Jurnal Syntax Fusion* (Vol. 1, Issue 2).